

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pada dasarnya, pencapaian kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi. Di Indonesia sendiri, pencapaian kesejahteraan juga merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-empat yang berbunyi "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..." Berbagai upaya pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Namun demikian, upaya mengonversikan kesejahteraan secara kuantitatif terus menjadi kajian di kalangan para ekonom. Pengertian dan metode untuk mengukur kesejahteraan di dalam pembangunan ekonomi pun dalam lima dasawarsa terakhir terus mengalami perkembangan. Para ahli ekonomi pembangunan klasik (awal pasca perang dunia kedua) sepakat bahwa kesejahteraan dapat direpresentasikan melalui tingkat pendapatan. Pendapat ini berpijak pada teori ekonomi konvensional (neoklasik) bahwa kesejahteraan (*Welfare*) merupakan fungsi dari kombinasi konsumsi barang dan jasa dimana kombinasi konsumsi akan meningkat seiring dengan tambahan pendapatan. Selain itu, tambahan pendapatan memungkinkan perekonomian negara untuk terus berkembang, baik dari segi tambahan jumlah barang dan jasa maupun

ketersediaan lapangan pekerjaan. Secara sederhana, pemikiran ahli ekonomi pembangunan klasik adalah bahwa pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sama dengan pertumbuhan ekonomi pada masa ini dan ukuran kesejahteraan atau keberhasilan pembangunannya adalah pendapatan perkapita<sup>2</sup>.

Kesejahteraan hidup masyarakat dapat dilihat dari kemampuan finansial masyarakat berdasarkan tingkat ekonomi tertentu. Dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, masyarakat harus berusaha atau bekerja. Masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas, biasanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan tinggi seperti membuka usaha yang besar. Namun untuk masyarakat di tingkat menengah ke bawah biasanya melakukan bisnis atau usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya<sup>3</sup>. Pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja, merupakan masalah sosial diantara beberapa masalah sosial lain yang terjadi di berbagai daerah. Fenomena kehidupan sosial tersebut bukan masalah yang tidak dapat diakomodir dan diminimalisir dihadapkan dengan keberagaman potensi sumber daya alam terdapat dan tersebar disetiap daerah. Namun sebaliknya dapat diakomodir sekalipun tidak mudah, sebagai contoh lahan kosong disekitar tempat tinggal dengan metode ekonomi kreatif, dimana lahan tersebut dapat diberdayakan menjadi produktif bernilai ekonomi<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Deddy Cahyadi, "Analisis Pengukuran Kesejahteraan di Indonesia," (Thesis, Universitas Brawijaya, Malang, 2017): 3.

<sup>3</sup> Erwan Iskandar, "Peran Ekonomi Kreatif dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Iqtishaduna; Economic Doctrine* 2, no. 2 (2021): 628.

<sup>4</sup> W. Wahyudi, dan A. Lamama, "Kebijakan Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Mirai Management* 8, no. 1 (2023): 608.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2024 mencatat persentase angka kemiskinan di Kabupaten Gresik berada di angka 10,32% atau sebanyak 142.390 jiwa. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan Maret 2021 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi *Covid-19* melanda Indonesia secara umum. Pada Maret 2022 jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik dapat kembali ditekan seiring pemulihan aktivitas ekonomi setelah pandemi *Covid-19*. Selanjutnya, pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik kembali mengalami penurunan sebesar 0,64 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1<sup>5</sup>.

**Tabel 1.1 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024**

Tahun	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	492 628	164,05	12,40
2021	505 499	166,35	12,42
2022	536 544	149,64	11,06
2023	588 316	149,75	10,96
2024	608 828	142,39	10,32

**Sumber:** Badan Pusat Statistik BPS) Kabupaten Gresik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020-2024

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan Kabupaten Gresik 2024,” 1 Agustus 2024, <https://gresikkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/01/258/profil-kemiskinan-kabupaten-gresik-maret-2024.html>, (diakses 12 November 2023).

Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik bukan tanpa sebab dikarenakan Pemerintah Kabupaten Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, lembaga non-pemerintah, serta sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi, dalam membangun infrastruktur dasar di desa seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang dirancang untuk memudahkan akses dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi lokal juga didorong, termasuk dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta bantuan modal bagi wirausaha lokal<sup>6</sup>.

Berubahnya peta perekonomian global menempatkan kreatifitas menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan global. Dalam konteks globalisasi, daya saing merupakan kunci utama untuk bisa sukses dan bertahan. Daya saing ini muncul tidak hanya dalam bentuk produk dalam jumlah banyak namun juga berkualitas. Kualitas produk tersebut dapat diperoleh melalui pencitraan ataupun menciptakan produk-produk inovatif yang berbeda dari wilayah lainnya sehingga diperlukan kreativitas yang tinggi untuk dapat menciptakan produk-produk inovatif dan berdaya saing secara global. Berangkat dari poin inilah, ekonomi kreatif menemukan eksistensinya dan berkembang. Secara umum, ekonomi kreatif diartikan sebagai suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas, dengan mengedepankan ide dan berbagai pengetahuan dari sumber daya manusia itu sendiri, sebagai faktor produksi yang paling utama. Dan menurut *United*

---

<sup>6</sup> Jihaan Khoirunnisaa, "Jurus Gus Yani-Bu Min Berhasil Tekan Angka Kemiskinan Gresik Jadi 10,32%," *detikJatim*, 12 Agustus 2024, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7486096/jurus-gus-yani-bu-min-berhasil-tekan-angka-kemiskinan-gresik-jadi-10-32>, (diakses 12 November 2023).

*Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi yang berkembang berdasarkan aset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi<sup>7</sup>. Sedangkan menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “ekonomi kreatif merupakan ekonomi gelombang ke-4 yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan”. Terdapat pergeseran orientasi gelombang ekonomi dalam sejarah manusia. Dimulai dari perubahan era pertanian ke era industrialisasi, setelah itu terbentuk era informasi yang diikuti dengan penemuan-penemuan bidang teknologi informasi. Pergeseran gelombang ini telah membawa peradaban yang baru dan semakin berkembang bagi manusia. Dampak yang muncul akibat dari fenomena perubahan gelombang ini adalah munculnya daya saing atau kompetisi pasar yang semakin besar. Kondisi ini menuntut perusahaan mencari cara agar menekan biaya semurah mungkin dan se-efisien mungkin guna mempertahankan eksistensinya. Negara-negara maju mulai menyadari bahwa saat ini mereka tidak bisa hanya mengandalkan bidang industri sebagai sumber ekonomi di negaranya tetapi mereka harus lebih mengandalkan sumber daya manusia yang kreatif, karena kreativitas manusia itu berasal dari daya pikirnya yang menjadi modal dasar untuk menciptakan inovasi dalam menghadapi daya saing atau kompetisi pasar yang semakin besar. Sehingga pada tahun 1990-an dimulailah era ekonomi baru

---

<sup>7</sup> Sopanah, Syamsul Bahri, dan Mohammad Ghazali, *Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020): 2.